

MAJELIS DIKTILITBANG MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI

USULAN PENELITIAN INTERNAL

**ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK TERHADAPPERTUMBUHAN
EKONOMI PROVINSI JAMBI MELALUI TINGKAT PENDIDIKANDAN TENAGA
KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**



**Dibiayai Oleh
Dipa Universitas Muhammadiyah Jambi tahun Anggaran 2023/2024**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI
2023**

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Praktisi	8
1.4.2 Manfaat Akademisi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Konsep Pembangunan Ekonomi	9
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	13
2.1.3 Jumlah Penduduk	16
2.1.4 Tingkat Pendidikan	19
2.1.5 Konsep Angkatan Kerja.....	22
2.1.6 Tenaga Kerja.....	39
2.2 Penelitian Terdahulu	46
2.3 Kerangka Pemikiran.....	50
2.4 Hipotesis.....	51

BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN	53
3.1 Metode Penelitian	53
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	53
3.3 Metode Analisis Data.....	54
3.3.1 Analisis Deskriptif.....	54
3.3.2 Analisis Kuantitatif Path Analysis	54
3.3.2.1 Uji Hipotesis.....	57
3.4 Operasional Variabel.....	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi, menggambarkan tingkat perubahan ekonomi dan dapat dijadikan indikator untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dan menentukan arah kebijakan pembangunan di masa datang. (Todaro, 2015). Pertumbuhan ekonomi, berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa dapat dilihat dari besarnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB)/ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Kuncoro, 2016).

Pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kemampuan produksi dan meningkatkan pendapatan masyarakat, maka perlu adanya upaya pengembangan-pengembangan dari faktor-faktor yang mendorong atau yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2018). Kemampuan mendorong pengembangan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan produksi dalam jumlah besar dan mendorong peningkatan kemakmuran atau tingkat kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2017).

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya dapat ditingkatkan dengan mengembangkan potensi dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia (Subandi, 2018). Jumlah penduduk yang besar dapat dijadikan sebagai potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, jika

penduduk berkualitas dan memiliki kemampu penguasaan teknologi dan berinovasi.

Faktor ekonomi bukanlah faktor tunggal dalam pertumbuhan ekonomi. Faktor non-ekonomi juga turut dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, beberapa studi menunjukan faktor kependudukan yang menurut (Wongboonsin & Phiromswad, 2017) dalam penelitiannya bahwasanya faktor demografis memberikan pengaruh pada perekonomian dibarengi pertumbuhan ekonomi yang berbeda di negara maju dibandingkan dengan negara berkembang.

Jumlah penduduk dapat dijadikan potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena mampu menentukan besar kecilnya ketersediaan jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja akan bermanfaat bila diikuti dengan adanya kemampuan menciptakan lapangan kerja sebesar mungkin. Jumlah tenaga kerja, termasuk didalamnya jumlah angkatan kerja, akan menjadi potensi di dalam meningkatkan produksi (*output*). Peningkatan produksi (*output*) dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja yang ada secara penuh (*full employment*) akan berdampak pada meningkatnya perekonomian daerah (Jhingan, 2017).

Kemampuan tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan sangat ditentukan oleh pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja itu sendiri. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi yang dimiliki tenaga kerja, akan membuat tenaga kerja mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, berinovasi, berkreasi dengan ketrampilan yang dimiliki dalam menghasilkan barang dan jasa serta memperluas pasar dan sebaliknya (Danim, 2017).

Tingkat pendidikan pada dasarnya dapat menggambarkan kualitas tenaga kerja (sumberdaya manusia) yang ada dalam menguasai kemajuan teknologi. Tingkat pendidikan yang relatif baik akan mendorong peningkatan produksi (*output*) melalui penguasaan teknologi terutama yang dimiliki tenaga kerja (Irianto, 2017). Produksi (*output*) dapat ditingkatkan menurut kaum Neo Klasik adalah dengan mengkombinasikan faktor modal dengan tenaga kerja yang berkualitas (Subandi, 2018). Produksi (*output*) yang meningkat nantinya akan memacu pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. (Sukirno, 2017)

Pertumbuhan ekonomi tinggi yang akan dicapai dalam pembangunan, tentu membutuhkan modal sebagai sumber pembiayaannya. Modal dalam proses pembangunan merupakan jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan tenaga kerja yang digunakan untuk membangun dan mendukung proses pembangunan dan mengembangkan kegiatan produksi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 1.1 dibawah ini

Tabel 1.1
Data Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan Dan Tenaga Kerja Di Provinsi Jambi Tahun 2016-2022

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tingkat Pendidikan (Tahun)	Tenaga Kerja (Jiwa)
2016	4,37	3.458.926	8,07	1.624.522
2017	4,60	3.515.017	8,15	1.657.817
2018	4,69	3.570.272	8,23	1.721.362
2019	4,37	3.624.579	8,45	1.691.782
2020	-0,46	3.548.228	8,55	1.739.003
2021	3,66	3.585.119	8,60	1.746.840
2022	5,13	3.631.136	8,68	1.797.819
Rata-Rata	3,77	3.561.897	8,39	1.711.306

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2023

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan secara fluktuasi dengan rata-rata peningkatan pertumbuhan ekonomi per tahun sebesar 3,77 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,1 persen dan penurunan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu tumbuh sebesar -0,46 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2020, yakni karena masih lemahnya ekonomi global saat itu, dan tren penurunan harga komoditas serta akibat terjadinya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Jambi lebih memfokuskan mengatasi covid-19 dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dapat mengurangi produksi dan daya beli masyarakat di Provinsi Jambi.

Sedangkan perkembangan jumlah penduduk Provinsi Jambi selama tahun 2016-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 0,82 persen pertahun atau rata-rata terjadi pertambahan penduduk sebanyak 28.702 jiwa selama 7 tahun terakhir atau dengan rata-rata jumlah penduduk sebanyak 3.561.897 jiwa. Lonjakan peningkatan jumlah penduduk akibat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi selama berlangsungnya penyelenggaraan otonomi daerah. Dan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi terendah terjadi pada tahun 2020, yakni turun 2,11 persen menjadi 3.548.228 jiwa dari tahun sebelumnya tahun 2019 jumlah penduduk Provinsi Jambi sebanyak 3.624.579 jiwa. Penurunan jumlah penduduk sebanyak 76.351 jiwa Provinsi Jambi di tahun

2020, akibat dari tingginya angka kematian pasca pandemi dan sedikit berkurangnya angka kelahiran bayi di Provinsi Jambi pada tahun 2020.

Untuk tingkat pendidikan di Provinsi Jambi dapat terlihat data rata-rata lama sekolah di Provinsi Jambi mengalami peningkatan tiap tahun, dimana selama periode 2016-2022 rata-rata lama sekolah Provinsi Jambi yaitu 8,39 tahun. Rata-rata lama sekolah Provinsi Jambi terendah terjadi di tahun 2016 yaitu dengan pendidikan yang diterima selama 8,07 tahun atau rata-rata masih di jenjang SLTP kelas 2. Tahun 2022 pendidikan di Provinsi Jambi mengalami peningkatan tertinggi dengan rata-rata lama sekolah yaitu 8,68 tahun atau rata-rata masih di jenjang SLTP kelas 3. Dalam hal ini menunjukkan secara kumulatif pendidikan di Provinsi Jambi selama periode 2016-2022 rata-rata lama sekolahnya masih di jenjang pendidikan SLTP kelas 2.

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Peningkatan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi baik untuk menurunkan jumlah pengangguran di provinsi Jambi. Namun, pada kenyataannya, jumlah pengangguran di provinsi Jambi terus bertambah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah belum mampu menjadi peluang dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa tenaga kerja dalam penelitian ini menggunakan jumlah penduduk bekerja yang ada di Provinsi Jambi. Terjadi peningkatan tenaga kerja tertinggi di Provinsi Jambi selama periode 2016-2022 terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,83 persen atau sebanyak 1.721.362 jiwa meningkat dari tahun 2017 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.657.817. Tingginya laju pertumbuhan ini disebabkan oleh banyaknya migran yang masuk ke Provinsi Jambi untuk mencari pekerjaan sebagai akibat perkembangan daerah dan peluang usaha yang masih terbuka luas.

Sedangkan perkembangan tenaga kerja terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar -1,72 persen atau sebanyak 1.691.782 jiwa turun dari tahun 2018 dengan besar tenaga kerjanya sebanyak 1.721.362 jiwa. Namun secara keseluruhan rata-rata jumlah tenaga kerja Provinsi Jambi selama periode tahun 2016-2022 mengalami peningkatan sebesar 1,72 persen atau rata-rata sebanyak 1.711.306 jiwa.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas maka menarik dikaji lebih lanjut mengenai pertumbuhan ekonomi dan keterkaitannya dengan variabel lainnya yaitu jumlah penduduk dan tingkat pendidikan serta tenaga kerja sebagai variabel interveningnya yang dituangkan dalam sebuah rancangan penelitian dengan judul : **“Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Melalui Tingkat Pendidikan Dan Tenaga Kerja Sebagai Variabel Intervening”**.

1.2 Perumusan Masalah

Atas dasar permasalahan dari latar belakang, maka rumusan masalah penelitian yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana perkembangan jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan tenaga kerja Provinsi Jambi?.
- 2) Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tingkat pendidikan dan tenaga kerja sebagai variabel intervening Provinsi Jambi?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka diharapkan tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan tenaga kerja Provinsi Jambi.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tingkat pendidikan dan tenaga kerja sebagai variabel intervening Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian yang saya lakukan ini adalah :

1.4.1 Manfaat Praktisi

Bagi praktisi menjadi bahan masukan informasi dalam merumuskan dan mempertimbangkan kebijakan–kebijakan yang dibuat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

1.4.2 Manfaat Akademisi

Bagi Akademisi dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para peneliti dan menjadi acuan, referensi, tambahan literatur dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya terutama mengenai pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk melalui tingkat pendidikan dan tenaga kerja sebagai intervenig.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Pembangunan Ekonomi

Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana (Rustiadi, 2015). Kemudian Arsyad (2018), menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.

Pembangunan ekonomi juga ditandai dengan terjadinya peningkatan taraf hidup yang tercermin dalam peningkatan pendapatan perkapita dan pemenuhan kebutuhan pokok. Penekanan pada kenaikan pendapatan perkapita dalam kurun waktu yang panjang diartikan bahwa disamping adanya pertumbuhan dalam kegiatan ekonomi dan pendapatan perkapita. Bila pertumbuhan GNP sama dengan atau lebih rendah dari tingkat pertumbuhan penduduk, maka pendapatan perkapita akan tetap sama atau bahkan turun.

Selanjutnya pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonominya dan taraf hidup masyarakatnya (Arsyad, 2018). Demikian juga Djoyohadikusumo (2015) mengartikan bahwa pembangunan sebagai suatu

transformasi dalam arti perubahan struktural yang dalam struktur ekonomi

masyarakat yang meliputi perubahan pada perimbangan-perimbangan keadaan yang melekat pada landasan kegiatan ekonomi dan bentuk struktur ekonomi.

Dengan kata lain orientasi pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) indikatornya bukan saja dilihat dari keberhasilan dalam bidang ekonomi semata, tetapi juga keberhasilan dalam bidang sosial. Dalam bidang ekonomi terukur dari kenaikan pertumbuhan ekonomi atau kenaikan pendapatan perkapita dalam jangka panjang, penurunan kemiskinan (*poverty*), pengangguran (*unemployment*), ketimpangan pendapatan (*income gap*), memperluas kesempatan kerja dan kestabilan tingkat inflasi.

Selain itu dalam arti luas pembangunan ekonomi mencakup aspek keuangan dan sektor riil, aspek keuangan segala aktivitas yang berkaitan dengan uang dan lembaga keuangan. Dalam sektor riil mencakup pembangunan sektoral yang berorientasi kepada transformasi struktural, keterkaitan antar sektor dan sektor basis. Dari aspek pasar bukan saja membicarakan pasar domestik tetapi juga pasar luar negeri. Beberapa variabel ekonomi yang dikembangkan antara lain konsumsi rumah tangga, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, tabungan, suku bunga, nilai tukar rupiah, cadangan devisa dan hutang luar negeri.

Pembangunan ekonomi juga berdimensi kependudukan, bukan saja mengatur jumlah penduduk tetapi juga merancang distribusi penduduk serta meningkatkan kualitas penduduk. Dengan sendirinya usaha kenaikan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan usaha menekan laju pertumbuhan penduduk

melalui kebijakan keluarga berencana dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan manfaat keluarga kecil, sederhana dan bahagia. Pertumbuhan ekonomi juga berimplikasi kepada penyebaran penduduk kepada daerah yang potensial dan sedikit penduduk, atau ke daerah yang mempunyai kesempatan kerja yang lebih banyak, selain penyebaran penduduk melalui mekanisme pasar tersebut, kebijakan keluarga berencana dan transmigrasi cukup berhasil mendorong percepatan perkembangan ekonomi.

Dengan ditetapkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah membawa implikasi besar terhadap percepatan perkembangan perekonomian daerah, dimana pemerintah daerah semakin mempunyai peranan penting dalam menggerakkan dan mempercepat perekonomian suatu daerah, yang diawali dengan menyusun perencanaan sesuai potensi dan sumber daya di daerah.

Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan, selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan perkapita.

Apabila suatu negara menghendaki pembangunan ekonomi yang lancar dan berkesinambungan, maka ia harus memulainya dari daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya. Selanjutnya dikatakan bahwa

daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya sama sekali tidak bersifat pasif dan jauh lebih penting dari sekedar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Keduanya harus ditempatkan pada kedudukan yang sebenarnya, yakni sebagai unsur atau elemen unggulan yang sangat penting, dinamis dan bahkan sangat menentukan dalam strategi-strategi pembangunan secara keseluruhan.

Selain itu Kuncoro (2016), ekonomi rakyat adalah perkonomian yang diselenggarakan oleh rakyat dan merupakan usaha ekonomi yang menjadi sumber penghasilan keluarga atau orang / per orang. Ini berarti bahwa perekonomian nasional maupun regional (daerah) harus berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas dalam menjalankan roda perekonomian (Sumodiningrat, 2015).

Selanjutnya Kuncoro (2016), mendefinisikan pembangunan ekonomi mengandung pengertian yang luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh, dan pembangunan ekonomi merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan pengertian pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat atau dengan kata lain peningkatan pendapatan perkapita.

Dari berbagai pengertian pembangunan ekonomi diatas, maka ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara sangat sulit untuk ditentukan, karena pembangunan ekonomi mempunyai dimensi yang luas, sedangkan ukuran pertumbuhan ekonomi lebih mudah untuk ditentukan yaitu dapat dilihat dari salah satunya seperti kenaikan pendapatan perkapita.

Selain itu indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat dari pengertian pembangunan ekonomi diatas adalah adanya perubahan struktur ekonomi (*structural Change*). Teori ini pertama kali dikemukakan oleh arthur Lewis (Boediono, 2016) yang dikenal dengan model pembangunan ekonomi dua sektor yaitu (a) sektor tradisional yaitu sektor dengan produktivitas yang sangat rendah, dan (b) sektor modern dengan tingkat produktivitas yang tinggi.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat penambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh penambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan

produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. (Sukirno, 2017).

Pertumbuhan ekonomi biasa bersifat positif, negatif atau statis. Pertumbuhan ekonomi dikatakan positif apabila terjadi kenaikan Output Total Riil (OTR) negatif jika terjadi penurunan OTR dan dikatakan statis jika tidak terjadi kenaikan maupun penurunan OTR. Pertumbuhan ekonomi terkait dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatkan hasil produksi dan pendapatan (Djojohadikusumo, 2015).

Untuk dapat mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, maka harus dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). PDB atau GDP adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah pada periode tertentu, misalnya satu tahun. (di level provinsi di Indonesia biasanya disebut Produk Domestik Regional Bruto-PDRB). PDB jika dibagi dengan jumlah penduduk maka menjadi PDB per kapita. Ukuran ini lebih spesifik karena memperhitungkan jumlah penduduk serta mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu tempat.

Penghitungan Pertumbuhan Ekonomi Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat Pertumbuhan Ekonomi.

- Tingkat Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto)
- Tingkat Pertumbuhan PNB (Produk Nasional Bruto)

PDB atau GDP adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah pada periode tertentu, misalnya satu tahun. (Di level provinsi di Indonesia biasanya disebut Produk Domestik Regional Bruto-PDRB). PDB jika dibagi dengan jumlah penduduk maka menjadi PDB per kapita. Ukuran ini lebih spesifik karena memperhitungkan jumlah penduduk serta mencerminkan kesejahteraan penduduk di suatu tempat.

Dengan mengetahui GDP ini maka kita dapat mengetahui banyak hal misalnya : Kelompok Negara manakah suatu negara apakah kaya, berkembang atau miskin. Hal penting lainnya yang bisa kita ketahui adalah perubahan struktur produksi suatu negara yaitu apakah negara tersebut berbasis atau menggantungkan diri dari sektor pertanian lalu berubah menjadi negara industri baru, dan lain sebagainya.

Rumus Menghitung Pertumbuhan Ekonomi

$$g = \{(PDBs - PDBk) / PDBk\} \times 100\%$$

Keterangan :

g = tingkat pertumbuhan ekonomi

$PDBs$ = PDB riil tahun sekarang

$PDBk$ = PDB riil tahun kemarin

Menurut Todaro (2015), terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, antara lain:

- a. Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.

Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari.

- b. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap menjadi salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif.
- c. Kemajuan teknologi merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atas perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional seperti kegiatan menanam jagung, membuat pakaian atau membangun rumah.

2.1.3 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan dalam membangun perekonomian suatu negara. Di negara berkembang masalah penduduk dan lapangan kerja selalu menjadi pokok perhatian. Persoalan yang timbul dari jumlah penduduk sudah sangat mendesak dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Di negara berkembang, pertumbuhan penduduk yang sangat besar menambah kerumitan masalah pembangunan. Dapat juga dikatakan bahwa masalah penduduk adalah masalah yang paling sukar dihadapi dan diatasi. Sudah sejak lama ahli ekonomi dan para ahli kependudukan menyadari bahwa

pengurangan laju pertumbuhan penduduk di negara berkembang adalah solusi penting yang harus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Akibat buruk yang mungkin ditimbulkan oleh perkembangan penduduk terhadap pembangunan akan tercipta apabila produktivitas sektor produksi sangat rendah dan dalam masyarakat terdapat banyak pengangguran. Dengan adanya kedua keadaan ini, pertumbuhan penduduk tidak akan menaikkan produksi secara signifikan. Yang lebih buruk lagi, masalah pengangguran akan bertambah serius. Disamping itu produktivitas yang sangat rendah akan menyebabkan perkembangan produksi pertanian yang sangat rendah pula.

Hal ini menurunkan tingkat pendapatan perkapita, Dan akhirnya dalam keadaan penduduk telah sangat berlebihan jumlahnya, pertumbuhan penduduk menimbulkan akibat yang kurang menguntungkan terhadap tingkat tabungan, penanaman modal, pembagian pendapatan, migrasi penduduk, kemampuan mengeksport dan beberapa faktor lain yang mempengaruhi laju pembangunan.

Ahli-ahli ekonomi pada umumnya sependapat bahwa perkembangan penduduk dapat menjadi faktor pendorong maupun penghambat pembangunan, hal ini dianggap sebagai faktor pendorong karena:

1. Perkembangan ini memungkinkan pertumbuhan jumlah tenaga kerja dari masa ke masa.
2. Pertumbuhan penduduk dan pemberian pendidikan kepada mereka sebelum menjadi tenaga kerja, memungkinkan sesuatu masyarakat memperoleh bukan saja tenaga kerja yang ahli, akan tetapi juga tenaga

kerja terdidik dan terampil. Hal ini akan memberikan sumbangan yang lebih besar bagi pengembangan kegiatan ekonomi

3. Perluasan pasar, luas pasar barang-barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Maka apabila penduduk bertambah dengan sendirinya luas pasar akan bertambah pula. Karena peranannya ini maka perkembangan penduduk akan merupakan pemacu bagi sektor produksi untuk meningkatkan kegiatannya.

Pertumbuhan penduduk adalah merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh beberapa komponen yaitu: kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), migrasi masuk dan migrasi keluar. Selisih antara kelahiran dan kematian disebut pertumbuhan alamiah (*natural increase*), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi netto. (Badan Pusat Statistik, 2022).

Adanya pengaruh positif pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di mana kondisi dan kemajuan penduduk sangat erat terkait dengan tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi. Penduduk disatu pihak dapat menjadi pelaku atau sumber daya bagi faktor produksi, pada sisi lain dapat menjadi sasaran atau konsumen bagi produk yang dihasilkan. Kondisi-kondisi kependudukan, data dan informasi kependudukan akan sangat berguna dalam memperhitungkan berapa banyak tenaga kerja akan terserap serta kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dan jenis-jenis teknologi yang akan dipergunakan untuk

memproduksi barang atau jasa. Dipihak lain pengetahuan tentang struktur penduduk dan kondisi sosial ekonomi pada wilayah tertentu, akan sangat bermanfaat dalam memperhitungkan berapa banyak penduduk yang dapat memanfaatkan peluang dan hasil pembangunan atau seberapa luas pangsa pasar bagi suatu produk usaha tertentu (Todaro, 2015).

2.1.4 Tingkat Pendidikan

Menurut BPS Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar di segala tingkatan baik formal maupun informal. Menurut Mahsunah (2013) bahwa pendidikan dapat diartikan yakni bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya agar mampu melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdesan, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan pendidikan adalah bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut Jundi (2014)

bahwa Pendidikan merupakan sarana untuk menghapuskan kebodohan, pendidikan sendiri memiliki beberapa jenjang pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi sederajat. Dimana semakin tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh orang tersebut.

Terdapat beberapa jalur pendidikan di Indonesia menurut UU No 20 Tahun 2003, yakni :

a) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang memiliki struktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Adapun jenjang-jenjang pendidikan formal yakni:

- 1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar ini berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
- 2) Pendidikan menengah, merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
3) Dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

- 4) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan secara sistem terbuka. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- b) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kepemudaan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- c) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang dilakukan oleh Keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil dari pendidikan diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pendidikan sebagai investasi dan kesempatan untuk berkompetisi guna mendapatkan kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan dan dapat terlibat dalam proses pembangunan. Dengan pendidikan yang

terprogram dengan baik dan menjangkau semua, dengan kualitas tertentu maka pendidikan menjadi instrumen yang paling efektif untuk memotong mata rantai kemiskinan yang ada di negara berkembang (Sholekah, 2016).

Tingkat pendidikan dalam penelitian ini menggunakan rata-rata lama sekolah. Dimana menurut Jundi (2014) bahwa rata-rata lama sekolah yang tinggi disuatu daerah maka kualitas tenaga kerja semakin meningkat pada daerah tersebut. Menurut Kumalasari (2015) bahwa rata-rata lama sekolah mengindikasikan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani seseorang maka semakin tinggi rata-rata lama sekolah. Dengan asumsi yang berlaku bahwa semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi kualitas serta pola pikir suatu individu.

2.1.5 Konsep Angkatan Kerja

Penciptaan lapangan pekerjaan merupakan cita-cita setiap pemerintahan yang bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Proses penciptaan lapangan pekerjaan sangat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi maka semakin marak kegiatan perekonomian yang berarti semakin banyak pula tenaga kerja yang diperlukan untuk mengerakkan roda perekonomian.

a. Bekerja Penuh (*Employed*)

Yaitu orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya lebih dari 35 jam / minggu.

b. Setengah Menganggur (*Underemployed*)

Yaitu mereka yang bekerja, tetapi belum dimanfaatkan secara penuh. Jam kerjanya kurang dari 35 jam/minggu. Berdasarkan definisi ini, tingkat pengangguran di Indonesia termasuk tinggi, yaitu 35 % per tahun.

c. Menganggur (*Unemployed*)

Yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini sering disebut penganggur terbuka. (Rahardja & Manurung, 2015).

Menurut Solow (Todaro, 2015) yang mengintrodusir pentingnya faktor tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi. Solow mengkritik formulasi Harold-Domar dari kelompok Keynesian yang hanya menggunakan pendekatan akumulasi modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Disebutkan bahwa teori pertumbuhan Solow mematahkan formulasi Harold-Domar berdasarkan pendekatan *Diminishing Return to Individual Factor of Production* (Debraj, 2013). dengan asumsi pertumbuhan tenaga kerja ditentukan secara eksogen dalam pertumbuhan ekonomi, Solow menjabarkan bahwa ketika stok modal tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dari pertumbuhan tenaga kerja, maka, jumlah pertumbuhan modal yang diciptakan oleh setiap tenaga kerja akan meningkat. Oleh karena pertumbuhan modal ini digunakan oleh setiap tenaga kerja, maka *marginal product of capital* akan menurun.

Keynes mengungkapkan bahwa kesempatan kerja akan meningkat dan upah juga akan bergerak naik selama tingkat upah yang berlaku dinilai lebih

rendah oleh para pengusaha daripada nilai marginal produk, setelah dikurangi dengan preferensi waktu-waktu sejalan dengan peningkatan sedikit demi sedikit yang dapat diharapkan melalui penggunaan tenaga kerja. Dilain pihak, kehilangan kesempatan kerja akan terjadi atau meningkat selama orang menilai bahwa nilai marginal produk yang didapat melalui swasembada, ataupun nilai kepuasan dari kegiatan waktu senggangnya (*leisure*), lebih tinggi dari upah yang mencerminkan produktivitas marginal jasa/tenaganya.

Menurut Gray (dalam Kurniasari, 2015), tujuan penciptaan kesempatan kerja berkaitan erat dengan pertimbangan pemerataan pendapatan, mengingat bagian terbesar kelompok penduduk yang tergolong penganggur sekaligus merupakan golongan yang berpenghasilan rendah. Dan terdapat golongan penganggur terdidik yang hidup dari bantuan keluarga sambil menunggu kesempatan kerja dengan tingkat upah yang memenuhi harapannya, biasanya kesempatan kerja di sektor pemerintah.

Tobing (2017), secara makro transformasi struktur ekonomi dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder dan tersier (industry dan jasa) tidak diikuti transformasi penyerapan tenaga kerja. Periode 1980-1988, penyerapan tenaga kerja sektor primer turun 9 (sembilan) persen menjadi 47 (empat puluh tujuh) persen; sementara sektor sekunder dari tersier hanya meningkat sebesar 3 (tiga) persen dari 23 (duapuluh tiga) persen. Dilain pihak kontribusi sektor primer terhadap PDB turun sebesar 9 (sembilan) persen menjadi 15 (lima belas) persen;

sektor sekunder dan tersier meningkat sekitar 14 (empat belas) persen menjadi 27 (dua puluh tujuh) persen.

Manurung (2015) menyatakan bahwa pada negara berkembang, Tenaga kerja (KL) masih merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output. Yang menjadi persoalan adalah sampai berapa banyak penambahan tenaga kerja yang akan meningkatkan output. Hal ini tergantung dari seberapa cepat terjadinya *The Law Diminishing Return (TDLR)*, sedangkan cepat lambatnya proses TDLR sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan keterkaitan dengan kemajuan teknologi (T) produksi. Selama sinergi antara TK dan teknologi maka penambahan TK akan memacu pertumbuhan ekonomi, dengan demikian dapat dikatakan pada saat terjadi pertumbuhan ekonomi di sisi lain juga akan terjadi penyerapan tenaga kerja.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Soekarni (2015) menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan pembangunan maka kualitas sumberdaya manusia adalah salah satu barang ekonomi yang langka dan oleh karenanya diperlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Berbeda dengan komoditi ekonomi lainnya. Kualitas sumberdaya manusia tidak mempunyai wujud fisik sehingga dikategorikan sebagai benda ekonomi berbentuk jasa. Walaupun kualitas fisik dan non fisik, kesulitan akan ditemui dalam pengukurannya. Upaya pengembangan sumberdaya manusia tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas manusia dan kualitas kehidupan masyarakat.

Upaya pengembangan sumberdaya manusia bagi Indonesia sangat penting artinya untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul, khususnya dalam bidang ekonomi. Menurut Sri Mulyani dan Ninasapati dalam Soekarni (2015) secara umum tantangan yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia adalah :

- a. Tantangan dari dalam terjadi karena transformasi perkembangan ekonomi dalam negeri yang telah mengubah wajah perekonomian dari dominasi negara agraris menjadi secara perlahan industri. Permasalahan yang muncul adalah pada transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri, dan transformasi di dalam sektor industri sendiri dari industri yang mengandalkan pada upah buruh dan keterampilan yang rendah menuju industri yang bertumpu pada kualitas buruh yang berketerampilan tinggi
- b. Tantangan yang berasal dari yang diakibatkan makin kuatnya arus globalisasi yang akan meningkatkan mobilitas arus sumberdaya manusia antarnegara.

Arus perdagangan dan investasi menjadi semakin marak dengan terbukanya hubungan antar negara, dimana kawasan Asia, termasuk Indonesia menjadi pusat dinamisor perkembangan tersebut. Dalam dimensi ketenagakerjaan globalisasi telah menciptakan kecenderungan atau trend sebagai berikut :

a) Meningkatnya arus investasi asing antar negara bersamaan dengan restrukturisasi, diversifikasi dan globalisasi industri akan memberikan dampak terhadap perubahan struktur tenaga kerja b) Perbedaan surplus dan defisit tenaga kerja antar negara akan menciptakan arus tenaga kerja antar negara yang potensial akan menghasilkan transfer keterampilan dan teknologi; c) Perpindahan tenaga kerja akan terjadi pada negara-negara yang memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah yang disertai dengan tingkat pengangguran dan setengah pengangguran tinggi ; d) Negara-negara yang menginjak tahap industrialisasi semakin menyadari pentingnya pendidikan dan latihan serta pengembangan sumberdaya manusia sebagai suatu alat strategis untuk menyelesaikan pembangunan.

Dalam konteks pembangunan daerah adanya perubahan struktur tenaga kerja tidak terlepas dari proses pembangunan di daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. (Arsyad, 2018)

Menurut teori neoklasik ada 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju daerah yang berupah rendah. (Arsyad, 2018). Di samping neoklasik, teori basis juga menyatakan bahwa faktorpenentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluangkerja (*job creation*).

Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (*aid*) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakan

mencakup pengurangan hambatan atau batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab.

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik dan sektor swasta, petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi-organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan. Para ahli ekonomi menyadari bahwa mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pertumbuhan pembangunan yang cepat terutama di negara sedang berkembang (NSB), mereka mulai sadar bahwa campur tangan pemerintah, terutama dalam pembangunan daerah, dimaksudkan untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati berbagai daerah yang ada. (Arsyad, 2018).

Menurut Arsyad (2018) ada 3 implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah : *Pertama*, perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi

tersebut. *Kedua*, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional. *Ketiga*, perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu perencanaan daerah yang efektif dapat dilakukan, dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan objek perencanaan.

Dalam konteks mengatasi pengangguran tidak terlepas dari upaya meningkatkan peluang usaha dan bekerja yang lebih besar pada masyarakat. Di samping itu upaya lain yang dapat dilakukan adalah menekan laju pertumbuhan penduduk. Menurut Kusumosuwidho (2015) Jumlah penduduk yang semakin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang semakin besar pula. Ini berarti makin besar jumlah orang yang mencari pekerjaan. Untuk mencapai keadaan yang seimbang maka seyogyanya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan serta keterampilan mereka. Ini membawa konsekuensi bahwa perekonomian seyogyanya harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru ini.

Selanjutnya Kusumosuwidho (2015) menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi harus tumbuh dan berkembang lebih cepat dari jumlah orang yang

sedang mencari pekerjaan. Keadaan ini sangat diperlukan untuk memperkecil pengangguran terbuka. Jika pembangunan/pertumbuhan ekonomi tidak lancar, maka jumlah orang yang tidak tertampung dalam suatu lapangan pekerjaan akan semakin besar pula, sebaliknya bila keadaan perekonomian suatu negara dalam keadaan makmur maka akan semakin kecil jumlah orang yang menganggur.

Memperhatikan perkembangan berbagai indikator ekonomi, ditingkat makro maupun mikro tampaknya kemerosotan ekonomi, jauh lebih besar lagi dampaknya terhadap pengangguran. Kebijakan penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran perlu mempertimbangkan keterkaitan antar sektor lapangan usaha. Langkah awal untuk mendukung kebijakan perluasan penyerapan tenaga kerja adalah peningkatan kualitas tenaga kerja, disamping itu perlu dipacu pertumbuhan ekonomi, sehingga akan menggerakkan mobilitas tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri.

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan yang selama ini kurang mendapat perhatian menurut Sagir (2015) adalah kesempatan kerja yang diciptakan oleh adanya pembangunan. Pembangunan tidak hanya meningkatkan pendapatan akan tetapi lebih dari itu mampu mendorong dan meningkatkan sumberdaya yang potensial yang dimiliki oleh suatu daerah. Khusus mengenai sumberdaya manusia yang merupakan salah satu sumberdaya ekonomi, memiliki dua dimensi potensial. Pertama, sebagai angkatan kerja yang berkeahlian dan berketerampilan, dalam jumlah yang besar memerlukan pendidikan dan pelatihan agar dapat menjadi tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai angkatan kerja

yang memiliki keahlian dan keterampilan serta berkemampuan untuk memimpin usaha atau proses produksi, yang jumlahnya secara kuantitatif sangat sedikit dibandingkan dengan tuntutan pembangunan.

Disinilah kemudian timbul masalah pasar kerja yang timpang. Dimana pasar kerja di Indonesia ditandai oleh kelebihan tenaga kerja yang tidak terampil yang sangat besar jumlahnya yang disebabkan terutama oleh struktur ekonomi yang belum mampu menyerap angkatan kerja yang ada, yang kenyataannya bertambah setiap tahun. Tetapi dilain pihak diberbagai sektor maupun wilayah terdapat kekurangan tenaga kerja yang terampil dan berkemampuan tinggi. Oleh karena itu masalah dan kebijaksanaan perluasan kesempatan kerja sebenarnya tidak terlepas dari konteks pembangunan secara keseluruhan yang dalam titiktolak dilandasi pemikiran oleh usaha mempertinggi produksi nasional.

Agar pendapatan penduduk meningkat, tetapi sekaligus harus pula mencerminkan adanya perluasan kesempatan kerja, sehingga terjadilah keseimbangan antara kewajiban untuk memikul beban pembangunan (melalui partisipasi memperoleh kesempatan kerja) dan hak untuk turut serta menikmati hasil pembangunan, berupa peningkatan penghasilan. (Sagir, 2015)

Secara lebih luas Arfida (2015) mengungkapkan bahwa penyediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh lamanya orang bekerja setiap minggu. Lamanya orang bekerja setiap minggu tidaklah sama, ada orang yang bekerja penuh, namun ada juga yang bekerja hanya beberapa jam seminggu. Semakin kecil jumlah orang

yang mampu bekerja secara penuh akan semakin besar beban lapangan pekerjaan untuk menampung mereka.

Selain adanya perbedaan kepentingan antara orientasi kesempatan kerja ataukah kepada peningkatan produksi (laju pertumbuhan) masalah kesempatan kerja juga menurut Sagir (2015) dihadapkan pada masalah-masalah struktur ekonomi yang kurang menguntungkan, dalam bentuk ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, baik antar wilayah, antar sektor ekonomi maupun pendidikan. Hal ini memberikan pengaruh terhadap perluasan kesempatan kerja, yaitu sebagaiberikut :

1. Masalah kependudukan diantara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.
2. Ketimpangan pembangunan antar wilayah.
3. Ketidakserasian laju pembangunan antara daerah kota dan daerah desa.
4. Kurang berkembangnya informasi pasar tenaga kerja sehingga menimbulkan kesenjangan permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja .
5. Kurang terdapatnya penyesuaian antara program pendidikan dengan arah pembangunan.
6. Ketimpangan koordinasi didalam pemilihan investasi padat modal dan padat karya.
7. Ketimpangan tingkat produktivitas antara sektor pertanian dan sektor non pertanian.
8. Kekurang serasian antara perkembangan sektor formal dan sektor informal.
9. Masalah pengangguran

10. Ketimpangan peranan pemerintah dan swasta

Peningkatan pembangunan idealnya seperti apa yang digambarkan dalam skema diatas adalah mendorong kesempatan kerja pada masyarakat dan meningkatkan daya tabung masyarakat, sehingga diharapkan tingkat investasi akan meningkat dari waktu kewaktu. Peningkatan investasi dapat dipandang sebagai upaya peningkatan kapasitas produksi. Peningkatan ini pada gilirannya akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja dan mendorong berkembangnya perekonomian.

Namun demikian kebijakan pembangunan yang hanya berorientasi kepada penggunaan teknologi tidak selamanya memberikan manfaat berupa peningkatan produktivitas pada satu sisi, namun disisi lain dapat menjadi beban dalam pembangunan berupa timbulnya masalah pengangguran, oleh karena itu diperlukan kebijakan yang sangat hati-hati dan lebih berorientasi kepadapemanfaatan tenaga kerja guna mengurangi dampak dari masalah pengangguran.

Kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari adanya berbagai kegiatan ekonomi. Dengan demikian pengertian kesempatan kerja adalah mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lapangan pekerjaan yang masih lowongan (Disosnakertrans). Dari lapangan pekerjaan yang masih lowongan tersebut (yang mengandung arti adanya kesempatan kerja) kemudian timbul kebutuhan akan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja ini nyata-nyata di perlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima tenaga kerja pada tingkat upah, posisi dan

syarat kerja tertentu. Tingkat upah, posisi maupun syarat-syarat kerja tertentu masanya diumumkan melalui iklan dan media massa atau selebaran-selebaran. Dengan demikian lapangan pekerjaan tersebut dapat sebagai lowongan.

Kesempatan kerja adalah lapangan kerja yang diduduki atau orang-orang yang mempunyai pekerjaan atau di pekerjakan. Lapangan kerja yang ada dalam masyarakat dapat di tempati oleh angkatan kerja disebut dengan kesempatan kerja. Lapangan kerja yang ada dalam masyarakat tidak selalu dapat bekerja. Sehingga dapat dikatakan kesempatan kerja menunjukkan banyaknya lapangan kerja yang tersisi, ini tercermin dari banyaknya penduduk yang bekerja.

Dengan kesempatan tenaga kerja yang merata, pembagian pendapatan pun merata, dirasakan sebagian unsur keadilan, pemerataan kesempatan kerja yang berarti sumber pendapatan akan menjamin mereka untu memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan perumahan) sekaligus kesempatan kerja mempunyai prndidikan dan pelayanan kesehatan, kesempatan permintaan perusahaan, berarti pula kesempatan kerja ataupun ataupun kesempatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain dalam peroses produksi. Kesempatan kerja berarti pula kesempatan berpartisipasi memikul beban pembangunan yang sekaligus menikmati hasil pembangunan (berupa sumber pendapatan).

Dasar perkiraan dari kesempatan kerja adalah rencana investasi dan target dari hasil yang direncanakan atau yang disebut juga dengan istilah rencana pembangunan. Karena setiap kegiatan yang direncanakan mempunyai daya serap yang berbeda terutama dalam penyerapan tenaga kerja, baik dalam hal kualitas

maupun kuantitasnya, yang mana daya serap tersebut tersebut berbeda secara sektoral dan menurut penggunaan teknologi. Jadi yang dimaksud dengan kesempatan kerja pada penelitian ini adalah bagian dari angkatan kerja yang bekerja pada berbagai lapangan usaha atau berbagai sektor ekonomi.

Penduduk di bedakan menjadi penduduk usia kerja (tenaga kerja) dan penduduk bukan usia kerja (bukan tenaga kerja). Penduduk usia kerja dikategorikan menjadi dua yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Dumairy (2017) membagi tenaga kerja kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak sedang bekerja dan tidak mencari pekerjaan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan yaitu orang-orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar dan mahasiswa) mengurus rumah tangga serta menerima pendapatan bukan merupakan imbalan langsung atau jasa kerjanya (pensiunan).

Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk yang berfungsi ikut serta dalam proses produksi dan menghasilkan barang-barang dan jasa tetapi pada suatu saat tertentu tidak semua tenaga kerja betul-betul ikut dalam proses produksi, dan inilah yang termasuk Indonesia. Kelompok penduduk yang seharusnya

menghasilkan barang dan jasa dinamakan angkatan kerja. Tenaga kerja adalah merupakan salah satu faktor-faktor produksi penting yang terdiri dari pekerjaan tangan atau mental mencapai imbalan atau upah, gaji, dan honorium. Tenaga kerja dalam masyarakat merupakan faktor potensi untuk membangun ekonomi secara keseluruhan. Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi, baik melalui pengukuran produktivitas melalui pengukuran pendapatan perkapita. Selain itu kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan merupakan sumber daya untuk menjalankan proses dan juga distribusi barang dan jasa (Winardi, 2017).

Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti sedang menggu panen, pegawai cuti dan lain sebagainya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau menharaapkan dapat bekerja juga dimaksudnya dalam angkataan kerja.

Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa. Sedangkan pengangguran adalah angkatan kerja yang belum dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar dari pada permintaan tenaga kerja. Dengan kata lain, terjadinya surplus penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Pengangguran seringkali menjadi

salah satu permasalahan negara-negara berkembang, disatu sisi jumlah penduduk dari tahun ketahun terus bertambah, disisi lain peningkatan kemampuan ekonomi, baik pemerintah maupun swasta tidak secepat peningkatan jumlah penduduk. Terjadinya ketimpangan antara laju permintaan lapangan kerja dengan laju penawaran lapangan kerja mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan juga meningkat.

Penduduk yang mencari pekerjaan adalah penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, termasuk didalamnya mereka yang belum pernah bekerja dan mereka yang sudah bekerja tetapi karena suatu hal berhenti atau diberhentikan. Dengan demikian dari penjelasan diatas akan lebih mudah dipahami dengan memperhatikan rumus berikut ini.

$$TK = AK + BAK$$

Dimana :

TK = Tenaga Kerja

AK = Angkatan Kerja

BAK = Bukan Angkatan Kerja

Menurut para ahli ekonomi ada beberapa bentuk strategi pekerjaan yang komprehensif untuk memperbaiki situasi pekerjaan yang dianggap serius yaitu : 1) menciptakan keseimbangan ekonomi pedesaan, perkotaan yang sesuai, 2) peluasan industri-industri kecil dengan intensifikasi tenaga kerja, 3) pengangguran distrosi harga, 4) memiliki teknologi produksi intensifikasi tenaga kerja yang sesuai, 5) mempengaruhi hubungan langsung antara pendidikan dengan pekerjaan.

2.1.6 Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*employment*) adalah kesempatan yang tercipta akibat perkembangan ekonomi tertentu, dalam arti kesempatan kerja itu mungkin saja sudah terisi atau ada yang belum terisi. Kesempatan kerja yang selama ini dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) baik melalui sensus penduduk maupun survei penduduk baik kesempatan kerja yang dirinci menurut lapangan usaha, jenis jabatan, maupun status hubungan kerja adalah menyangkut kesempatan kerja yang telah terisi. Jadi menyangkut mereka yang telah bekerja dan ini juga dapat disebut pekerja (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2022)

Istilah *employment* dalam bahasa Inggris berasal dari kata kerja *to employ* yang berarti menggunakan dalam suatu proses atau usaha memberikan pekerjaan atau sumber penghidupan. Jadi *employment* berarti keadaan orang yang sedang mempunyai pekerjaan. Penggunaan istilah *employment* sehari-hari biasa dinyatakan dengan jumlah orang dan yang dimaksudkan ialah sejumlah orang yang ada dalam pekerjaan atau mempunyai pekerjaan. Pengertian ini mempunyai dua unsur yaitu lapangan atau kesempatan kerja dan orang yang dipekerjakan atau yang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi pengertian *employment* dalam bahasa Inggris sudah jelas yaitu kesempatan kerja yang sudah diduduki (Soeroto, 2015).

Pengangguran dalam suatu negara adalah perbedaan diantara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu

perekonomian pada suatu tertentu. Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi yaitu (1) jumlah penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun dan belum ingin bekerja (contoh adalah pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga dan pengangguran sukarela), dan (2) jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang masuk pasar kerja (yang sudah ingin bekerja) jumlah penduduk dalam golongan (2) dinamakan angkatan kerja dan penduduk golongan (1) dinamakan bukan angkatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja dalam suatu periode tertentu dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk usia kerja dengan jumlah bukan angkatan kerja. Perbandingan diantara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam persen dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan

masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah, (Arsyad, 2018).

Menurut teori neoklasik ada 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju daerah yang berupah rendah. (Arsyad, 2018). Di samping neo klasik, teori basis juga menyatakan bahwa faktorpenentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri- industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluangkerja (*job creation*).

Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (*aid*) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakan mencakup pengurangan hambatan atau batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut.

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab.

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik dan sektor swasta, petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi-organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan. Para ahli ekonomi menyadari bahwa mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pertumbuhan pembangunan yang cepat terutama di negara sedang berkembang (NSB), mereka mulai sadar bahwa campur tangan pemerintah, terutama dalam pembangunan daerah, dimaksudkan untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati berbagai daerah yang ada. (Arsyad, 2018).

Menurut Arsyad (2018) ada 3 implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah : *Pertama*, perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.

Kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional. *Ketiga*, perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu perencanaan daerah yang efektif dapat dilakukan, dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan objek perencanaan.

Dalam konteks mengatasi pengangguran tidak terlepas dari upaya meningkatkan peluang usaha dan bekerja yang lebih besar pada masyarakat. Di samping itu upaya lain yang dapat dilakukan adalah menekan laju pertumbuhan penduduk. Menurut Kusumosuwidho (2015) jumlah penduduk yang semakin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang semakin besar pula. Ini berarti makin besar jumlah orang yang mencari pekerjaan. Untuk mencapai keadaan yang seimbang maka seyogyanya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan serta keterampilan mereka. Ini membawa konsekuensi bahwa perekonomian seyogyanya harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru ini.

Selanjutnya Kusumosuwidho (2015) menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi harus tumbuh dan berkembang lebih cepat dari jumlah orang yang

sedang mencari pekerjaan. Keadaan ini sangat diperlukan untuk memperkecil pengangguran terbuka. Jika pembangunan/pertumbuhan ekonomi tidak lancar, maka jumlah orang yang tidak tertampung dalam suatu lapangan pekerjaan akan semakin besar pula, sebaliknya bila keadaan perekonomian suatu negara dalam keadaan makmur maka akan semakin kecil jumlah orang yang menganggur.

Memperhatikan perkembangan berbagai indikator ekonomi, ditingkat makro maupun mikro tampaknya kemerosotan ekonomi, jauh lebih besar lagi dampaknya terhadap pengangguran. Kebijakan penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran perlu mempertimbangkan keterkaitan antar sektor lapangan usaha. Langkah awal untuk mendukung kebijakan perluasan penyerapan tenaga kerja adalah peningkatan kualitas tenaga kerja, disamping itu perlu dipacu pertumbuhan ekonomi, sehingga akan menggerakkan mobilitas tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri.

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan yang selama ini kurang mendapat perhatian menurut Sagir (2015) adalah kesempatan kerja yang diciptakan oleh adanya pembangunan. Pembangunan tidak hanya meningkatkan pendapatan akan tetapi lebih dari itu mampu mendorong dan meningkatkan sumberdaya yang potensial yang dimiliki oleh suatu daerah. Khusus mengenai sumberdaya manusia yang merupakan salah satu sumberdaya ekonomi, memiliki dua dimensi potensial. Pertama, sebagai angkatan kerja yang berkeahlian dan berketerampilan, dalam jumlah yang besar memerlukan pendidikan dan pelatihan agar dapat menjadi tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai angkatan kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan serta berkemampuan untuk memimpin

usaha atau proses produksi, yang jumlahnya secara kuantitatif sangat sedikit dibandingkan dengan tuntutan pembangunan.

Disinilah kemudian timbul masalah pasar kerja yang timpang. Dimana pasar kerja di Indonesia ditandai oleh kelebihan tenaga kerja yang tidak terampil yang sangat besar jumlahnya yang disebabkan terutama oleh struktur ekonomi yang belum mampu menyerap angkatan kerja yang ada, yang kenyataannya bertambah setiap tahun. Tetapi di lain pihak diberbagai sektor maupun wilayah terdapat kekurangan tenaga kerja yang terampil dan berkemampuan tinggi. Oleh karena itu masalah dan kebijaksanaan perluasan kesempatan kerja sebenarnya tidak terlepas dari konteks pembangunan secara keseluruhan yang dalam titiktolak dilandasi pemikiran oleh usaha mempertinggi produksi nasional.

Agar pendapatan penduduk meningkat, tetapi sekaligus harus pula mencerminkan adanya perluasan kesempatan kerja, sehingga terjadilah keseimbangan antara kewajiban untuk memikul beban pembangunan (melalui partisipasi memperoleh kesempatan kerja) dan hak untuk turut serta menikmati hasil pembangunan, berupa peningkatan penghasilan (Sagir, 2015).

Secara lebih luas Arfida (2015), mengungkapkan bahwa penyediaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh lamanya orang bekerja setiap minggu. Lamanya orang bekerja setiap minggu tidaklah sama, ada orang yang bekerja penuh, namun ada juga yang bekerja hanya beberapa jam seminggu. Semakin kecil jumlah orang yang mampu bekerja secara penuh akan semakin besar beban lapangan pekerjaan untuk menampung mereka.

Namun demikian kebijakan pembangunan yang hanya berorientasi kepada penggunaan teknologi tidak selamanya memberikan manfaat berupa peningkatan produktivitas pada satu sisi, namun disisi lain dapat menjadi beban dalam pembangunan berupa timbulnya masalah pengangguran, oleh karena itu diperlukan kebijakan yang sangat hati-hati dan lebih berorientasi kepadapemanfaatan tenaga kerja guna mengurangi dampak dari masalah pengangguran serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan dibawah ini :

Puspita Sari (2020). Meneliti tentang “Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan Sebagai Variabel Intervening Di Sumatera Selatan Tahun 2010-2018”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, Jumlah penduduk berpengaruh terhadap Kemiskinan, Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk memediasi kemiskinan sebagai variabel intervening, Tingkat Pendidikan tidak memediasi kemiskinan.

Imam Nafi', Hartiningsih Astuti (2021). Meneliti tentang “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tenaga Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Bojonegoro”. Hasil penelitian Pertumbuhan

Penduduk di Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berpengaruh positif namun dianggap kurang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Bojonegoro. ini dikarenakan Peningkatan Pertumbuhannya tidak terlalu besar. Angkatan Kerja jika dilihat dari jumlah penduduk usia produktif atau usia 15 sampai 45 tahun sebanyak 1.028.824 tenaga kerja. Dari data tersebut, 719.362 orang termasuk kedalam angkatan kerja. Dari angkatan kerja itu, yang bekerja sebanyak 695.431 orang.

Rendra Erdkhadifa (2022). Meneliti tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Dengan Pendekatan Spatial Regression”. Hasil analisis menunjukkan bahwa fungsi pembobot yang digunakan yaitu fixed gaussian dan model spasial memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 92,97%. Variabel pendidikan, dan investasi berpengaruh positif signifikan sedangkan variabel indeks pembangunan manusia, kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi yang berbeda ditunjukkan pada variabel pengeluaran pemerintah yang mana pada beberapa kabupaten/kota berpengaruh positif maupun negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi spasial ini menunjukkan heterogenitas daerah di Jawa Timur yang tinggi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang penting bagi pemerintah guna menentukan langkah besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten atau kota di provinsi Jawa Timur.

Citra Ayu Basica Effendy Lubis (2014). Meneliti tentang “Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Pekerja Dan Pengeluaran Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Hasil penelitian dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan bahwa variabel jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan pekerja dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2006-2012.

Sri Ayuni Purnamasari, dkk. (2017). Meneliti tentang “Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tenggara”. Hasil pembangunan dapat diukur dengan menggunakan indikator jumlah output yang dihasilkan selama periode tertentu. Penggalan sumber daya sendiri perlu dioptimalkan agar dapat digunakan sebagai input pembangunan perekonomian daerah yang mandiri. Desentralisasi kekuasaan dalam rangka peningkatan kemampuan daerah untuk mengoptimalkan sumber daya lokal diharapkan akan mendorong memajukan pembangunan daerah masing-masing sehingga diharapkan akan memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tingkat daerah maupun nasional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data tahunan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan variabel bebasnya adalah investasi dan tenaga kerja. Sejalan dengan masalah dan hipotesis dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan metode statistika dengan menggunakan persamaan regresi data panel dengan 3 pendekatan metode Common

Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM).

Ida Bagus Agung Bayu windayana, dkk. (2020). Meneliti tentang “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Umk, Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali”. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2014-2018. Hasil penelitian ini : (1) Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, UMK berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, Investasi berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali; (2) Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, UMK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali; (3) UMK berpengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel intervening. Sedangkan tingkat pendidikan dan investasi tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan penyerapan tenaga kerja bukan sebagai variabel intervening.

Novi Sri Handayani, dkk. (2016). Meneliti tentang “Pengaruh Jumlah Penduduk, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah Dan PDRB Per Kapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali”. Penelitian ini bertujuan : 1). untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, angka harapan hidup, rata-rata

lama sekolah, PDRB atas dasar harga konstan terhadap pertumbuhan ekonomi, 2). untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah terhadap PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Provinsi Bali,3). untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung melalui PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Provinsi Bali.

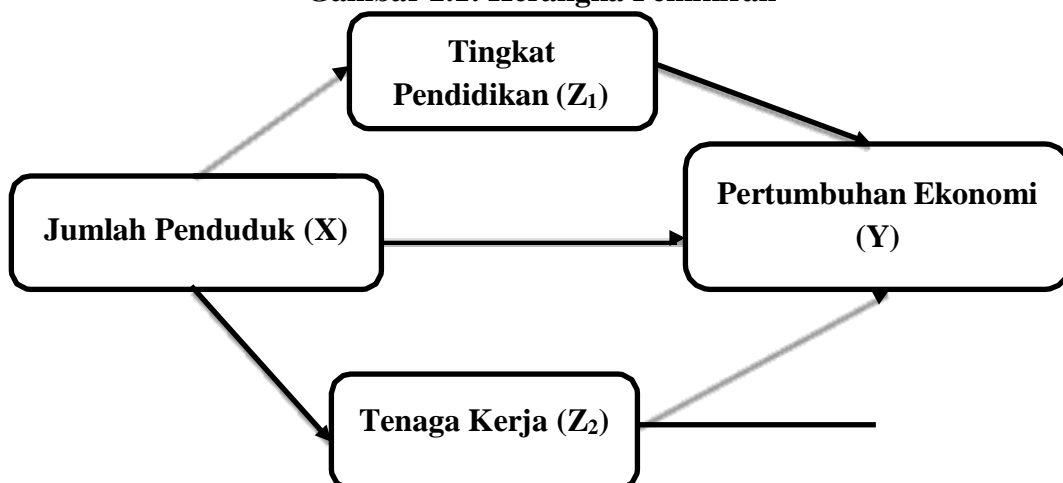
Dwi Suryanto, (2011). Meneliti tentang “Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Subosukawonosraten Tahun 2004-2008”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Subosukawonosraten. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel data (data time series selama 5 tahun dari 2004-2008 dan data cross-section sebanyak 7 data mewakili kawasan Subosukawonosraten yang menghasilkan 35 observasi). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Least Square Dummy Variabel (LSDV). Hasil ertimasi yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Subosukawonosraten.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu, jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan tenaga kerja. Ketga variabel tersebut merupakan variabel

independen, bersama-sama dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen akan diregres untuk mendapatkan tingkat signifikansinya. Dengan hasil regresi tersebut diharapkan mendapatkan tingkat signifikansi setiap variabel independen dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya tingkat signifikansi setiap variable independen tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah dan pihak yang terkait mengenai ppeningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi untuk dapat merumuskan suatu kebijakan yang relevan. Secara skema, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah teori sementara yang kebenarannya masih perlu diuji setelah peneliti mendalami permasalahan penelitiannya dengan seksama serta berdasarkan studi empiris penelitian yang pernah dilakukan di bidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut: Diduga jumlah penduduk berpengaruh

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang dimediasi tingkat pendidikan dan tenaga kerja (sebagai variabel intervening) di Provinsi Jambi.

BAB III

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah riset kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan informasi yang berasal dari kepustakaan, laporan-laporan, artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh landasan teori dan informasi yang diinginkan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menurut runtun waktu atau time series dari tahun 2010–2022. Pengumpulan data sekunder dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi instansi-instansi yang terkait berupa BPS Provinsi Jambi dan web resminya. Sehingga diperoleh publikasi data dan laporan-laporan yang dibutuhkan dalam pengembangan pola pikir dan kesempurnaan penelitian dengan data-data yang mesti dikumpulkan yaitu data pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan tenaga kerja di Provinsi Jambi.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Analisis Deskriptif

Teknik analisis data deskriptif merupakan teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Yang termasuk dalam teknik analisis data statistik deskriptif diantaranya seperti penyajian data kedalam bentuk grafik, tabel, presentase, frekuensi, diagram, grafik, mean, modus dan lain-lain.

Adapun perhitungan yang digunakan untuk melihat permasalahan pertama atau melihat bagaimana perkembangan jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan tenaga kerja Provinsi Jambi.

digunakan formula sederhana sebagai berikut :

$$G = \frac{X_{(t)} - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \dots \dots \dots (3.1)$$

Dimana

G = Perkembangan variabel X

X_(t) = Variabel X Data awal tahun

X_(t-1) = Variabel X Data Tahun Sebelumnya

3.3.2 Analisis Kuantitatif Path Analysis

Menurut Sani & Maharani (2013) Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul (dalam penelitian kuantitatif).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Path analysis atau analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan diantara variabel (Sani dan Maharani, 2013). Model ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel (endogen) Riduwan dan Kuncoro (2008) dalam Sani dan Maharani (2013). Menurut Ridwan bahwa koefisien jalur (path) adalah koefisien regresi yang distandarkan, yaitu koefisien regresi yang dihitung dari basis data yang telah diset dalam angka baku (Z-score). Analisis ini dibantu dengan bantuan software SPSS 16, dengan ketentuan uji F pada Alpha = 0,05 atau $\leq 0,05$ sebagai taraf signifikansi F (sig. F) sedangkan untuk uji T taraf signifikansi Alpha = 0,05 atau $p \leq 0,05$ yang dimunculkan kode (sig.T) dimanahal tersebut digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Model Analisis dalam penelitian ini ada dua bentuk: Struktur model persamaan I

$$Y = \alpha + \beta_1 X + e$$

Untuk stuktur model persamaan II :

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Z_1 + e$$

Kemudian, untuk stuktur model persamaan III :

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_3 Z_2 + e$$

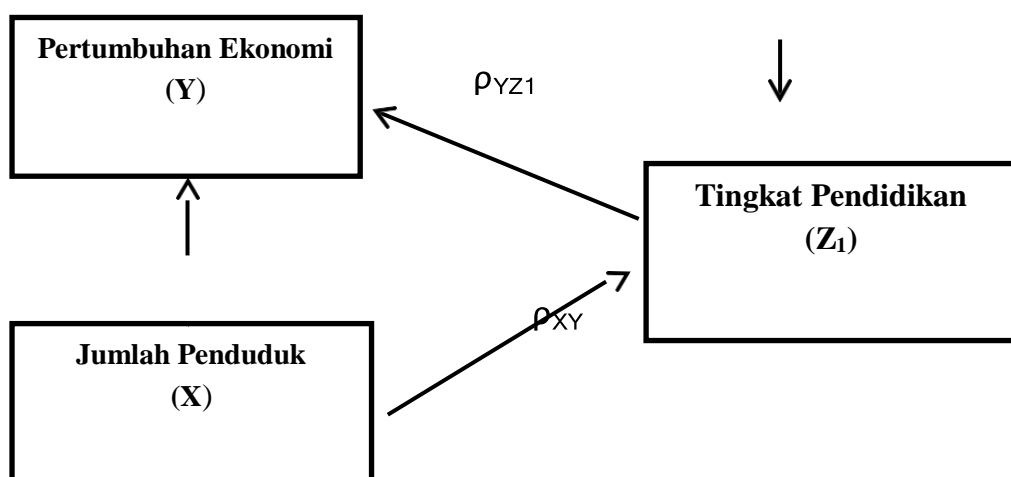
Keterangan :

- α : Konstanta
 β_{1-3} : Koefisien Regresi
Y : Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (Persen)
X : Jumlah Penduduk Provinsi Jambi (Jiwa)
 Z_1 : Tingkat Pendidikan Provinsi Jambi (Tahun)
 Z_2 : Tenaga Kerja Provinsi Jambi (Tahun)
e : Variabel Pengganggu

Path Analysis atau analisis jalur bertujuan dalam melihat pengaruh tidak langsung dari variabel intervening yang bertindak sebagai penengah atau mediator antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan (Z_1) dan tenaga kerja (Z_2) berfungsi sebagai variabel intervening, jumlah penduduk (X) sebagai variabel bebasnya dan kemudian pertumbuhan ekonomi (Y) sebagai variabel terikat. Keterkaitan variabel dapat digambarkan pada bagan analisis jalur (*Path Analysis*) sebagai berikut

$$\text{Struktural 2 : } Z_1 = \rho_{XZ_1} X + \rho_{YZ_1} Y + \rho_{Z_1}\epsilon_1$$

Gambar 3.1. Analisis Jalur Hubungan Struktur X Melalui Z_1 Terhadap Y



$$\rho_{XZ1}$$

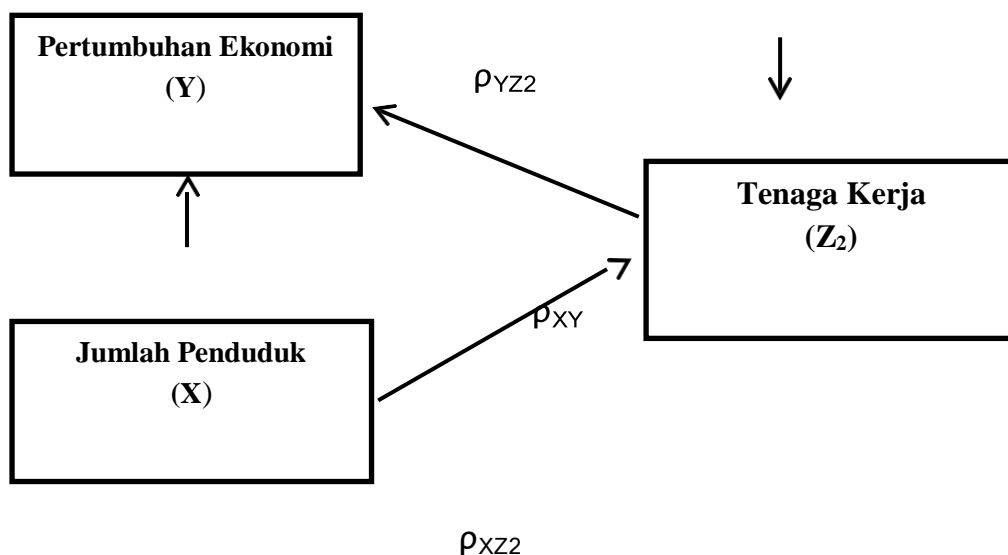
Dengan demikian persamaan struktural untuk diagram jalur diatas adalah:

Maka persamaannya sebagai berikut :

$$Z_1 = \rho_{XZ1} X + \rho_{YZ1} Y + \rho_{Z1}\epsilon_1$$

$$\text{Struktural 3 : } Z_2 = \rho_{XZ2} X + \rho_{YZ2} Y + \rho_{Z2}\epsilon_2$$

Gambar 3.2. Analisis Jalur Hubungan Struktur X Melalui Z₂ Terhadap Y



Dengan demikian persamaan struktural untuk diagram jalur diatas adalah:

Maka persamaannya sebagai berikut :

$$Z_2 = \rho_{XZ2} X + \rho_{YZ2} Y + \rho_{Z2}\epsilon_2$$

3.3.2.1 Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R-Squared)

Koefisien determinasi (R-Squared) dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen memberi penjelasan terhadap variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$).

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas β_1, β_2 yang diterangkan oleh variabel terikat yang dilihat dari nilai R^2 . koefisien determinasi dengan formulasi :

$$R^2 = \frac{\sum ei}{(Y - y)^2}$$

Dimana R^2 nilainya antar 0 sampai dengan 1, jika mendekati nilai 0 ini berarti kurang kuat pengaruh hubungan antara variabel independent dengan dependent sedangkan jika nilainya mendekati 1, maka ini menunjukkan semakin besarnya hubungan antara kedua variabel tersebut (menerangkan varian antar variabel independen dan variabel dependen).

2. Uji t-Statistik

Uji t-statistik merupakan suatu pengujian secara parsial yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Dalam uji ini, digunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \beta_{1-2} = 0$ (tidak ada pengaruh)

$H_a : \beta_{1-2} \neq 0$(ada pengaruh)

Dalam β_{1-2} adalah koefisien variabel independen ke-i nilai parameter hipotesis, biasanya β dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh

variabel X terhadap Y. Bila nilai t-statistik > t-tabel maka pada tingkat kepercayaan tertentu H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan.

$H_0 : \beta = 0$ H_0 diterima (t-statistik < t-tabel) artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta \neq 0$ H_a diterima (t-statistik > t-tabel) artinya variabel independen secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi yang ditaksir sebagai pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, digunakan uji t statistik (t- test) dengan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{\alpha_1}{Se(\alpha_1)}$$

Dimana :

t = t - hitung

α_1 = Koefisien regresi

Se = Standar Error.

Dengan membandingkan t-hitung dan t-tabel pada tingkat keyakinan tertentu dapat diambil kesimpulan dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika t hitung > t tabel, maka H_0 di tolak yang berarti variabel bebas mampu menerangkan variabel terikat.

- 2) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima yang berarti secara individu variabel bebas tidak mampu menjelaskan variabel terikat.

3. Uji F-Statistik

Uji F-statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \beta_{1-2} = 0$ (tidak ada pengaruh)

$H_a : \beta_{1-2} \neq 0$ (ada pengaruh)

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ H_0 diterima ($F_{hitung} < F_{tabel}$) artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$ H_a diterima ($F_{hitung} > F_{tabel}$) artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

Nilai F hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$F_n = \frac{R^2 / (K - 1)}{(I - R^2) / (n - k)}$$

Dimana :

F_n	= F hitung
R^2	= Koefisien Determinasi
K	= Jumlah variabel bebas
n	= Jumlah Sampel

Untuk kriteria pengujiannya yaitu sebagai berikut :

- 1) Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak artinya bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
- 2) Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima artinya bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

3.4 Operasional Variabel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel-variabel diantaranya adalah :

1) Jumlah Penduduk (X)

Orang yang tinggal selama lebih dari 6 bulan di wilayah Provinsi Jambi dalam satuan jiwa dan dikumpulkan tiap tahun.

2) Perumbuhan Ekonomi (Y)

Total jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian yaitu berupa sektor-sektor ekonomi di Provinsi Jambi yang

diukur melalui rasio PDRB yang dinyatakan Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Jambi dengan satuan yang digunakan persen.

3) Tingkat Pendidikan (Z_1)

Rata-Rata Lamanya pendidikan yang ditempuh masyarakat Provinsi Jambi di sekolah yang diukur dalam tahun selama periode penelitian.

4) Tenaga Kerja (Z_2)

Jumlah tenaga kerja atau jumlah penduduk produktif berumur 15 (limabelas) tahun ke atas yang bekerja di berbagai sektor di Provinsi Jambi, dinyatakan dalam satuan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Irianto. 2017. Statistik Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya. Jakarta: PT. Prenada Media Group.
- Arfida. 2015. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arsyad, L. 2018. Ekonomi Pembangunan. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. 2022. Jambi Dalam Angka Tahun 2010-2021. Jambi
- Boediono. 2016. Ekonomi Internasional. Yogyakarta: BPFE.
- Citra Ayu Basica Effendy Lubis (2014). Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Pekerja Dan Pengeluaran Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/view/7544>.
- Danim, Sudarwan. 2017. Motivasi kepemimpinan dan efektivitas kelompok. Jakarta: Rineka Cipta
- Debraj Subedi. 2013. Employee Commitment And Organizational Performance: A Study Of A Cooperative Jute Mill In India. Indian Journal of Commerce & Management Studies. ISSN : 2240 0310 EISSN: 2229-5674 . Volume 3, Issue 3.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 2015. Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta : LP3ES.
- Dumairy, 2017, Perekonomian Indonesia, jakarta: Erlangga
- Dwi Suryanto, (2011). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Subosukawonosraten Tahun 2004-2008. Universitas Diponegoro.
<https://core.ac.uk/download/11726255.pdf>.
- Erdkhadifa, R. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Dengan Pendekatan Spatial Regression. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(2), 122-140.
<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i2.729>

- Handayani, Putu Novi Sri; Bendesa, I K.G; Yuliarmi, Ni Nyoman. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah Dan Pdrb Per Kapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, [S.L.], Nov. 2016. Issn 2337-3067. Available At: <<https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Eeb/Article/View/22861>>. Date Accessed: 25 July 2023.
- Ida Bagus Agung Bayu windayana, dkk. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Umk, Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia. DOI: <https://doi.org/10.24843/EEB.2020.v09.i01.p04>.
- Jhingan, M. L. 2017. Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. Jakarta: Rajawali Pers
- Jundi, Musa Al (2014), “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi di Indonesia”, Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kumalasari, F. dan Satoto, Y. (2015) Teknis Praktis Mengolah Air Kotor Menjadi air Bersih Hingga Layak Minum. Bekasi: Laskar Askara.
- Kuncoro, Mudrajad, 2016, Indikator Ekonomi, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Kurniasari, Luvi. (2015). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Job Insecurity Karyawan Terhadap Intensi Turnover. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Kusumosuwidho, S. (2015). Angkatan Kerja Dalam Dasar-Dasar Demografi, Lembaga Demografi.
- Mahsunah, D., (2013). “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur”. Jurnal. Universitas Negeri Surabaya.
- Nafi, Imam, & Astuti, H. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tenaga Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 4(1),44-51. <https://doi.org/10.56071/jemes.v4i1.258>
- Paul L. Tobing. (2017) Konsep Knowledge Management, Konsep, Arsitektur dan Implementasi, Graha Ilmu.

- Puspita Sari, Nim : 1646200193 (2020) *Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan Sebagai Variabel Intervening Di Sumatera Selatan Tahun 2010- 2018*. Diploma Thesis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2015. *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Rustiadi Ernani, Saefulhakim Sunsun dan R.Panuju Dyah. 2015. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta. Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sagir, Suharsono. 2015. *Membangun Manusia Karya, Masalah Ketenagakerjaan dan pengembangan SDM*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sani, Achmad & Vivin Maharani. 2013. *Metodologi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Kuisisioner dan Analisis Data)*. Malang :UIN MALIKI Press. Cetakan Ke-2.
- Sholekah, Ida. 2016. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Kabupaten/Kota Adm di Provinsi DKI Jakarta Periode 2008-2014)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Soekarni et.al. 2015. “Potensi dan Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan”. Jakarta : Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI.
- Soeroto. 2015. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*, Gadjah Mada University Press, Jakarta
- Sri Ayuni Purnamasari, dkk. (2017). *Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jurnal Publik. DOI: <http://dx.doi.org/10.33772/jpep.v2i2.8084>.
- Subandi, & Syahidi, A. A. (2018). *BASIS DATA Teori dan Praktik Menggunakan Microsoft Office Access*. Banjarmasin: Deepublish.
- Sukirno, Sadono. 2017. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sumodiningrat, Gunawan, 2015, Responsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi, Jakarta, PerProd.

Todaro, Michael P. 2015. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Winardi, 2017, Manajemen Perilaku Organisasi , Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Wongboonsin, K., & Phiromswad, P. (2017). Searching for empirical linkages between demographic structure and economic growth. *Economic Modelling* 60, 364–379.